



# CALK PPS BUNGUS

TAHUN ANGGARAN 2025



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, 31 Desember 2025  
Kepala Pelabuhan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Widodo, S.Pi, M.Sc  
NIP.197101071999031002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT

TELEPON/FAX: (0751) 751122

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [pps.bungus@kkp.go.id](mailto:pps.bungus@kkp.go.id)

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Lampiran Catatan Penting Bulan Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 31 Desember 2025  
Kepala Pelabuhan



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Widodo, S.Pi, M.Sc  
NIP.197101071999031002

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus *Unaudited* Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,014,108,141,- atau mencapai 100,1 persen dimana memenuhi target atau estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.012.118.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12,573,561,670,- atau mencapai 93,27 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp13.840.428.000,-.

### **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp161,079,341,336,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp15,500,200,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp160,134,513,717,-; Properti Investasi sebesar Rp792,719,109,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp136,608,310,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp148,013,725,- dan Rp161,079,341,336,-.

### **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non Operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,716,233,218,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp16,061,895,932,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(14,345,662,714),- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp237,891,561,- dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(14,107,771,153),-

### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp164.471.147.735,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(14,107,771,153),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10,567,951,029,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp160,931,327,611,-.

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
**UNAUDITED**

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032  
 ESEKON I : DITJEN PERIKANAN TANGKAP 03  
 SATUAN KERJA : PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS- 531488

Tgl Data : 23/02/25 2:43 AM  
 Tgl Cetak : 23/02/25 9:48 AM  
 Halaman : 1  
 lap\_ina\_faoe\_sabkr\_new\_poo

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	3	5	7	8	9	10
<b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	2,012,118,000	2,014,108,141	1,390,141	100.1	2,480,807,000	2,435,690,182	154,883,182	106.2
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kelayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,012,118,000	2,014,108,141	1,000,141	100.1	2,480,807,000	2,435,690,182	154,883,182	106.2
<b>III. Pendapatan Hibah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b>	2,012,118,000	2,014,108,141	1,390,141	100.1	2,480,807,000	2,435,690,182	154,883,182	106.2
<b>B. Belanja Negara</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	13,481,482,000	12,573,581,870	(907,900,330)	93.27	16,538,260,000	16,147,513,056	(390,746,944)	97.64
1. Belanja Pegawai	7,818,519,000	7,807,524,558	(10,994,444)	99.88	8,100,187,000	8,093,232,944	(6,954,056)	99.91
2. Belanja Barang	5,445,943,000	4,548,933,674	(896,909,326)	83.53	7,243,877,000	6,862,181,588	(381,695,412)	94.73
3. Belanja Modal	416,120,000	416,103,440	(16,560)	100.0	1,194,366,000	1,192,098,524	(2,267,476)	99.81
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fisikal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	13,481,482,000	12,573,581,870	(907,900,330)	93.27	16,538,260,000	16,147,513,056	(390,746,944)	97.64
<b>C. PEMSAHYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :  
 FINAL

PADANG, 23 Februari 2025  
 Penanggung Jawab UAS/PA  
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Ditandatangani  
 Secara Elektronik  
 WIDODO  
 NIP. 197101071966031002

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**II. NERACA**

**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
UNAUDITED**

*(Dalam Rupiah)*

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : ( 531488 ) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

Tgl Data : 23/02/26 2:43 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 9:48 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7,197,100	103,533,967	(96,336,867)	(93.05)
Persediaan	8,303,100	13,723,995	(5,420,895)	(39.50)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>15,500,200</b>	<b>117,257,962</b>	<b>(101,757,762)</b>	<b>(86.78)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	122,261,085,000	122,261,085,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	20,411,180,230	19,983,746,790	427,433,440	2.14
Gedung dan Bangunan	24,481,494,752	24,481,494,752	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	48,011,772,592	48,011,772,592	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	61,765,000	61,765,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(55,092,783,857)	(51,248,321,194)	(3,844,462,663)	7.50
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>160,134,513,717</b>	<b>163,551,542,940</b>	<b>(3,417,029,223)</b>	<b>(2.09)</b>
<b>Properti Investasi</b>				
Properti Investasi	969,595,000	969,595,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(176,875,891)	(153,073,605)	(23,802,286)	15.55
<b>JUMLAH Properti Investasi</b>	<b>792,719,109</b>	<b>816,521,395</b>	<b>(23,802,286)</b>	<b>(2.92)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	3,862,942,809	5,005,860,809	(1,142,918,000)	(22.83)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,726,334,499)	(4,863,836,570)	1,137,502,071	(23.39)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>136,608,310</b>	<b>142,024,239</b>	<b>(5,415,929)</b>	<b>(3.81)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>161,079,341,336</b>	<b>164,627,346,536</b>	<b>(3,548,005,200)</b>	<b>(2.16)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	111,827,703	83,659,274	28,168,429	33.67
Pendapatan Diterima Dimuka	36,186,022	72,539,527	(36,353,505)	(50.12)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>148,013,725</b>	<b>156,198,801</b>	<b>(8,185,076)</b>	<b>(5.24)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>148,013,725</b>	<b>156,198,801</b>	<b>(8,185,076)</b>	<b>(5.24)</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	160,931,327,611	164,471,147,735	(3,539,820,124)	(2.15)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>160,931,327,611</b>	<b>164,471,147,735</b>	<b>(3,539,820,124)</b>	<b>(2.15)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>160,931,327,611</b>	<b>164,471,147,735</b>	<b>(3,539,820,124)</b>	<b>(2.15)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>161,079,341,336</b>	<b>164,627,346,536</b>	<b>(3,548,005,200)</b>	<b>(2.16)</b>

Keterangan :

FINAL

PADANG, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani  
Secara Elektronik

WIDODO

NIP 197101071999031002

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

#### LAPORAN OPERASIONAL

#### UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 UNAUDITED

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 ESELON I : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT  
 SATUAN KERJA : ( 531488 ) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

Tgl Data : 23/02/26 2:43 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 9:48 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,716,233,218	2,505,960,721	(789,727,503)	(31.514)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,716,233,218	2,505,960,721	(789,727,503)	(31.514)

PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,716,233,218	2,505,960,721	(789,727,503)	(31.514)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,614,909,891	8,094,737,544	(479,827,653)	(5.928)
Beban Persediaan	60,170,645	288,956,255	(228,785,610)	(79.177)
Beban Barang dan Jasa	3,405,036,935	4,409,926,788	(1,004,889,853)	(22.787)
Beban Pemeliharaan	711,793,696	847,849,218	(136,055,522)	(16.047)
Beban Perjalanan Dinas	399,136,387	1,273,611,306	(874,474,919)	(68.661)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,870,848,378	3,933,220,534	(62,372,156)	(1.586)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(205,235,073)	205,235,073	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	16,061,895,932	18,643,066,572	(2,581,170,640)	(13.845)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(14,345,662,714)	(16,137,105,851)	1,791,443,137	(11.101)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	237,791,200	0	237,791,200	
Pendapatan Pelepasan Aset	237,791,200	0	237,791,200	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100,361	7,698,932	(7,598,571)	(98.696)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100,361	7,698,932	(7,598,571)	(98.696)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	237,891,561	7,698,932	230,192,629	2,989.929
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14,107,771,153)	(16,129,406,919)	2,021,635,766	(12.534)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(14,107,771,153)	(16,129,406,919)	2,021,635,766	(12.534)

Keterangan :  
FINAL

PADANG, 23 Februari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani  
Secara Elektronik

WIDODO  
NIP. 197101071999031002

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
**UNAUDITED**

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT  
 SATUAN KERJA : ( 531488 ) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM  
 Tgl Cetak : 23/02/26 9:48 AM  
 Halaman : 1  
 lap\_lpe\_salker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	164,471,147,735	167,088,731,780	(2,617,584,045)	(1.57)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14,107,771,153)	(16,129,406,919)	2,021,635,766	(12.53)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10,567,951,029	13,511,822,874	(2,943,871,845)	(21.79)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,539,820,124)	(2,617,584,045)	(922,236,079)	35.23
EKUITAS AKHIR	160,931,327,611	164,471,147,735	(3,539,820,124)	(2.15)

Keterangan :  
 FINAL

PADANG, 23 Februari 2026  
 Penanggung Jawab UAKPA  
 Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani  
 Secara Elektronik

WIDODO

NIP 197101071999031002

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**A. PENJELASAN UMUM**

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK No.222/PMK.05/2016 Tentang perubahan PMK No.177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

*Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Bulan Desember Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Entitas.

*Basis Akuntansi*

### **A.3 Basis Akuntansi**

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bulan Desember Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

*Pendapatan- LRA*

#### **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan LO*

##### **(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

#### *Belanja*

##### **(3) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KPPN sebagai BUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

##### **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

#### *Aset*

##### **5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

#### *Aset Lancar*

##### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
  - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

### Aset Lainnya

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### Kewajiban

#### (6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.